JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan
Volume : 8 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi pada Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan

Author:
Nurhalizah[1]
Irawan[2]
Tia Novira Sucipto[3]

Afiliation:
Universitas Panca Budi[1,2,3]

Corresponding email
nurhalizah827@gmail.com[1]
irawan@dosen.pancabudi.ac.id[2]
tianovirasucipto@dosen.pancabudi.ac.id[3]

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar belakang: Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi. Namun, pada praktiknya masih ditemukan permasalahan seperti rendahnya kualitas pelayanan, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas, khususnya di tingkat kecamatan.
Metode penelitian: Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif melalui metode associative-causal. Pengumpulan data dengan kuesioner skala Likert pada 88 responden memanfaatkan teknik sampling jenuh, lalu dilaksanakan analisis melalui Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) memanfaatkan SmartPLS 4.0.
Hasil penelitian: Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas yang tergolong cukup baik dengan skor rerata masing-masing 3,21 dan 3,24, serta kinerja instansi sebesar 3,22. Secara statistik, akuntabilitas berpengaruh signifikan positif bagi kinerja instansi ($\beta = 0{,}387$; $p < 0{,}05$), serta keterbukaan informasi publik turut berpengaruh signifikan positif ($\beta = 0{,}494$; $p < 0{,}05$). Model mampu menjelaskan 52,6% variasi kinerja instansi.
Kesimpulan: Keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas merupakan faktor penting yang secara signifikan meningkatkan kinerja instansi. Semakin tinggi transparansi dan pertanggungjawaban aparatur, maka semakin optimal kinerja instansi dalam memberikan pelayanan publik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Kinerja Instansi, Keterbukaan Informasi Publik

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah bukan sekadar melaksanakan fungsi administratifnya, melainkan turut harus memberikan layanan yang cepat, tepat, dan responsif (Widanti, 2022). Perihal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 serta UU No. 25 Tahun 2009

yang menekankan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, efisien, serta mudah diakses dan adil (Indriastuti, 2020).

Kinerja instansi mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan pelayanan (Handayani et al., 2024), yang diukur melalui ketepatan waktu, pencapaian target, kepuasan masyarakat, dan kualitas layanan (Dessler, 2020). Kinerja yang baik meningkatkan kepercayaan publik (Gumolung et al., 2023), namun masih dihadapkan pada kendala seperti rendahnya kualitas layanan, keterbatasan SDM, lemahnya perencanaan, dan pengawasan internal (Kementerian PANRB, 2024; LAKIP Kabupaten Deli Serdang, 2023; Pemerintah Kota Medan, 2023; Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2024).

Keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja instansi (Yashyfa, 2023), karena memungkinkan akses informasi yang cepat dan akurat sesuai UU No. 14 Tahun 2008 (Arifin, 2022). Meskipun indeks nasional meningkat, implementasinya di tingkat kecamatan masih terkendala (Oktaviani, 2023). Di sisi lain, akuntabilitas berperan dalam memastikan pertanggungjawaban kebijakan dan kinerja secara transparan (Mardiasmo, 2021), melalui indikator seperti kejelasan IKU dan evaluasi berkala.

Kecamatan Medan Helvetia sebagai ujung tombak pelayanan publik masih menghadapi kendala dalam penyampaian informasi dan kejelasan tanggung jawab aparatur, yang berdampak pada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja instansi. Penelitian sebelumnya memperlihatkan pengaruh positif kedua variabel tersebut (Shandy & Sriwinarti, 2023; Puspitawati & Marsellina, 2022), meskipun terdapat perbedaan hasil (Ambarwati, 2021) dan masih terbatasnya studi di tingkat kecamatan (Saleh, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, tujuan studi ini guna melaksanakan analisis akan pengaruh keterbukaan informasi publik serta akuntabilitas bagi kinerja instansi di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, sekaligus mengisi kesenjangan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Studi Literatur

Good Governance

Good Governance ialah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan sinergi antara negara, sektor swasta, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada United Nations Development Program (UNDP) pada "Governance for Sustainable Human Development" (1997), good governance ialah keterkaitan yang sinergis serta konstruktif di antara ketiga aktor tersebut (Widanti, 2022). Secara umum, good governance berfokus pada pengelolaan sumber daya dengan efektif, transparan, efisien, serta akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan good governance ialah menciptakan pemerintahan yang efisien, bertanggung jawab, efektif, solid, serta memelihara sinergi antar negara, sektor swasta, sekaligus masyarakat (Nurhidayat, 2023). Prinsip-prinsip utamanya meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum (*rule of law*), responsivitas, keadilan serta kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta orientasi pada konsensus (UNDP, 1997; Segarawasesa, 2023).

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan akan informasi publik ialah unsur krusial dalam pemerintahan demokratis sebagai bentuk transparansi dan mekanisme pengawasan masyarakat. Menurut Andriana (2025), keterbukaan informasi bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik melalui penyediaan informasi yang terbuka serta kemudahan dalam pengaksesan. Maka dari itu, keterbukaan informasi publik bisa meningkatkan rasa percaya masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan keterbukaan informasi publik meliputi peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga, terciptanya

sistem pemerintahan yang transparan dan efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Mustofa, 2020). Indikatornya mencakup ketersediaan informasi (profil, kinerja, laporan keuangan, prosedur), penyebaran informasi sektor publik, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat (Chairunnisa, 2023).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam good governance yang menekankan kewajiban pejabat atau instansi publik guna mempertanggungjawabkan tiap tindakan, keputusan, serta pemanfaatan sumber daya pada masyarakat. Menurut Mareta (2024), akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja serta kebijakan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan akuntabilitas adalah meningkatkan transparansi, menjamin pertanggungjawaban, mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Sine et al., 2023). Indikator akuntabilitas meliputi transparansi informasi, pencapaian tujuan program, pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang tepat waktu, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Mardiana, 2022).

Kinerja Instansi

Kinerja instansi merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas, mencapai tujuan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hasibuan (2021), kinerja adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dari segi kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Kinerja dikenai pengaruh oleh faktor individu, organisasi, lingkungan kerja, serta faktor eksternal (Mangkunegara, 2021). Penilaian kinerja mengacu pada indikator seperti dampak, manfaat, hasil, keluaran, dan masukan yang digunakan dalam pelaksanaan program (Fanggidae, 2022). Dengan demikian, kinerja instansi mencerminkan efektivitas, efisiensi, serta mutu pelayanan publik yang dibagikan pada masyarakat.

Metode Penelitian

Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif melalui metode *associative-causal research* yang mempunyai tujuan guna melaksanakan analisis akan pengaruh keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pada Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan (Sugiyono, 2022). Kemampuan guna melaksanakan pengukuran variabel dengan objektif melalui data numerik, pengujian hipotesis, serta penarikan simpulan yang bersifat generalisasi menjadi dasar pemilihan pendekatan ini. Pengumpulan data dilaksanakan lewat memanfaatkan kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis melalui teknik regresi serta pendekatan Partial Least Square (PLS-SEM) guna mengidentifikasi dampak variabel bebas bagi variabel dependen baik dengan parsial ataupun simultan.

Studi dilaksanakan di Kantor Kecamatan Medan Helvetia dengan populasi seluruh ASN dan pegawai yang terlibat langsung dalam pelayanan publik. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh dikarenakan jumlah populasi relatif kecil (di bawah 100 orang), menjadikan semua populasi berperan sebagai sampel (Sugiyono, 2022). Data yang dimanfaatkan meliputi data primer yang didapatkan lewat kuesioner serta data sekunder dari dokumen instansi. Variabel penelitian meliputi kinerja instansi sebagai variabel dependen yang diukur melalui indikator dampak, manfaat, hasil, keluaran, dan masukan (Hasibuan, 2021; Fanggidae, 2022), serta keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas sebagai variabel independen dengan indikator masing-masing (Chairunnisa, 2023; Mardiana, 2022).

Teknik pengumpulan data memanfaatkan kuesioner skala Likert dengan lima kategori jawaban (Sugiyono, 2022; Ghozali, 2022). Data dianalisis memanfaatkan statistik deskriptif serta PLS-SEM melalui SmartPLS 4.0 yang meliputi pengujian outer model (validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas komposit) serta pengujian inner model (koefisien jalur, R-square, Q-square, dan Goodness of Fit) (Marliana, 2020; Musyaffi et al., 2022; Ghozali & Latan, 2015). Uji hipotesis dilaksanakan lewat mengamati skor t-statistic > 1,96 serta p-value < 0,05 guna menetapkan signifikansi hubungan antar variabel dalam model penelitian (Budiarto et al., 2021).

Hasil

Karakteristik Responden

Table 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	38	43,2%
		Perempuan	50	56,8%
		Total	**88**	**100%**
2	Umur	≤ 30 Tahun	13	14,8%
		31 – 40 Tahun	23	26,1%
		41 – 50 Tahun	32	36,4%
		≥ 51 Tahun	20	22,7%
		Total	**88**	**100%**
3	Pendidikan	SLTA	16	18,2%
		D-III	12	13,6%
		S-1	52	59,1%
		S-2	8	9,1%
		Total	**88**	**100%**

Mengacu pada tabel 1, dominasi responden dengan jenis kelamin perempuan (56,8%), berada pada rentang usia 41–50 tahun (36,4%), dan memiliki tingkat pendidikan S-1 (59,1%), sehingga memperlihatkan bahwasanya responden didominasi oleh aparatur berpengalaman dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Analisis Deskripsi Variabel

Table 2. Analisis Deskripsi Variabel

No	Variabel	Rata-Rata
1	Keterbukaan Informasi Publik (X1)	3.21
2	Akuntabilitas (X2)	3.24
3	Kinerja Instansi (Y)	3.22

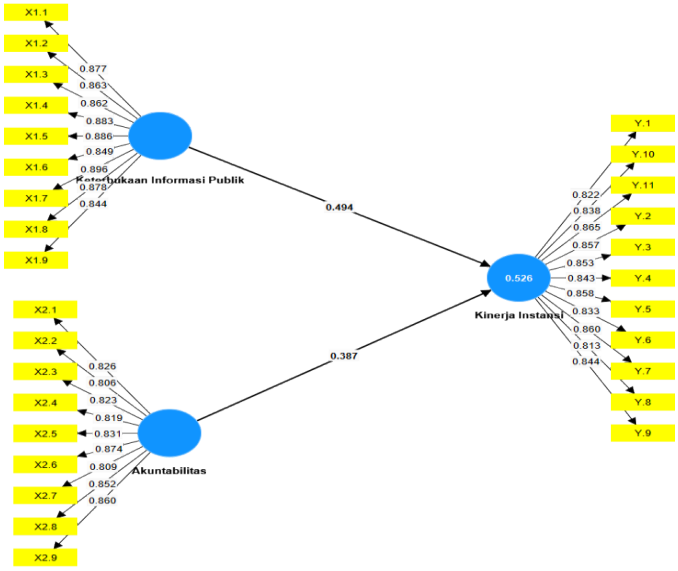
Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata keterbukaan informasi publik (3,21), akuntabilitas (3,24), dan kinerja instansi (3,22) memperlihatkan bahwasanya ketiga variabel tergolong dalam kategori cukup baik. Perihal tersebut membuktikan bahwasanya instansi telah menerapkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dengan cukup memadai, yang berdampak pada kinerja instansi yang juga dinilai cukup baik oleh responden, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar mencapai kondisi yang lebih optimal.

Outer Model

Hubungan antara konstruk laten dengan indikator-indikator penyusunnya dijabarkan melalui model pengukuran dalam PLS-SEM yang dikenal sebagai outer model. Penilaian akan tingkat validitas serta reliabilitas instrumen dilakukan melalui model ini, sehingga ketepatan serta konsistensi indikator dalam

merepresentasikan konstruk bisa dipastikan. Tahapan evaluasi outer model dilaksanakan sebelum pengujian inner model, berikut perolehannya:

Gambar 1. Outer Model



1. *Convergent validity*

   Convergent validity dimanfaatkan guna mengukur sejauh apa setiap indikator dengan sesungguhnya merepresentasikan dan berkorelasi kuat dengan variabel laten yang diukurnya. Berikut perolehan atas uji *Convergent Validity* pada studi ini ditampilkan :

Table 3. Outer Loading

No	Variabel	Indikator	*Outer Loading*	Keterangan
1	Keterbukaan Informasi Publik (X1)	X1.1	0.877	Valid
		X1.2	0.863	Valid
		X1.3	0.862	Valid
		X1.4	0.883	Valid
		X1.5	0.886	Valid
		X1.6	0.849	Valid
		X1.7	0.896	Valid
		X1.8	0.878	Valid
		X1.9	0.844	Valid
2	Akuntabilitas (X2)	X2.1	0.826	Valid
		X2.2	0.806	Valid
		X2.3	0.823	Valid
		X2.4	0.819	Valid

		X2.5	0.831	Valid
		X2.6	0.874	Valid
		X2.7	0.809	Valid
		X2.8	0.852	Valid
		X2.9	0.86	Valid
3	Kinerja Instansi (Y)	Y.1	0.822	Valid
		Y.2	0.857	Valid
		Y.3	0.853	Valid
		Y.4	0.843	Valid
		Y.5	0.858	Valid
		Y.6	0.833	Valid
		Y.7	0.86	Valid
		Y.8	0.813	Valid
		Y.9	0.844	Valid
		Y.10	0.838	Valid
		Y.11	0.865	Valid

Mengacu pada tabel sebelumnya, terlihat bahwasanya nilai *Loading Factors* bagi tiap indikator atas variabel studi melebihi 0,7. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya instrumen pada studi ini valid.

2. *Discriminant Validity*

Discriminant validity mempunyai tujuan guna memastikan bahwasanya sebuah variabel laten mempunyai diferensiasi yang jelas dengan variabel laten lainnya. Berikut perolehan atas uji *Discriminant Validity* pada studi ini:

Table 3. Fornell Larcker

Variabel	Akuntabilitas (X2)	Keterbukaan Informasi Publik (X1)	Kinerja Instansi (Y)
Akuntabilitas (X2)	0.834		
Keterbukaan Informasi Publik (X1)	0.346	0.871	
Kinerja Instansi (Y)	0.558	0.628	0.844

Nilai akar kuadrat dari Average Variance Extracted yang lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk lain ditunjukkan pada perolehan uji validitas diskriminan dengan kriteria Fornell–Larcker berdasarkan tabel tersebut. Kemampuan setiap konstruk dalam menjabarkan varians indikatornya sendiri yang lebih dominan dibandingkan varians yang dikenai pengaruh oleh

konstruk lain dalam model studi tercermin dari kondisi ini. Selain itu, pengukuran *Discriminant Validity* juga dilakukan melalui pendekatan *Cross Loading* yang ditampilkan oleh tabel di bawah:

Table 4. Cross Loading

Indikator	Akuntabilitas (X2)	Keterbukaan Informasi Publik (X1)	Kinerja Instansi (Y)
X1.1	0.353	0.877	0.489
X1.2	0.265	0.863	0.558
X1.3	0.288	0.862	0.52
X1.4	0.327	0.883	0.551
X1.5	0.285	0.886	0.559
X1.6	0.277	0.849	0.558
X1.7	0.325	0.896	0.593
X1.8	0.322	0.878	0.542
X1.9	0.277	0.844	0.538
X2.1	0.826	0.218	0.498
X2.2	0.806	0.243	0.393
X2.3	0.823	0.269	0.531
X2.4	0.819	0.294	0.461
X2.5	0.831	0.328	0.5
X2.6	0.874	0.197	0.371
X2.7	0.809	0.329	0.453
X2.8	0.852	0.328	0.464
X2.9	0.86	0.367	0.462
Y.1	0.435	0.517	0.822
Y.2	0.406	0.554	0.857
Y.3	0.551	0.456	0.853
Y.4	0.47	0.439	0.843
Y.5	0.457	0.536	0.858
Y.6	0.463	0.524	0.833
Y.7	0.485	0.621	0.86
Y.8	0.36	0.501	0.813
Y.9	0.497	0.493	0.844
Y.10	0.467	0.586	0.838
Y.11	0.562	0.573	0.865

Mengacu pada tabel sebelumnya, terlihat bahwasanya skor *cross loading* atas tiap indikator lebih tinggi dibandingkan *cross loading* pada variabel laten lainnya, melalui karakteristik skor di

atas 0,50. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya semua instrumen pada studi ini mencukupi validitas diskriminan.

3. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ialah tahapan guna melaksanakan penilaian akan konsistensi serta keandalan sebuah instrumen studi guna mengukur suatu konsep secara berulang kali. Jika instrumen tersebut dapat menciptakan perolehan yang konsisten pada saat dimanfaatkan pada keadaan yang yang serupa, maka instrumen tersebut terbukti reliabel. Berikut perolehan atas pengujian reabilitas pada studi ini:

Table 5. Uji Reliabilitas

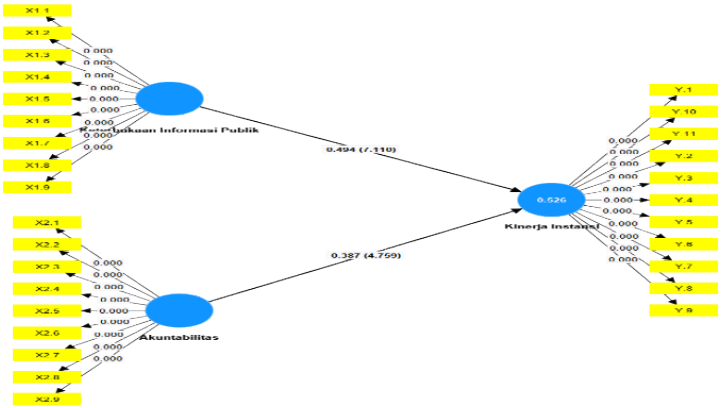
Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas (X2)	0.945	0.948	0.953	0.695
Keterbukaan Informasi Publik (X1)	0.960	0.961	0.966	0.759
Kinerja Instansi (Y)	0.960	0.961	0.965	0.713

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh skor *Cronbach's Alpha* bagi tiap variabel melebihi 0,6. Skor AVE juga memperlihatkan skor melebihi 0,5. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya seluruh instrumen yang dimanfaatkan pada studi ini reliabel.

Inner Model

Uji inner model atau evaluasi model struktural dilaksanakan pasca pengujian outer model atau evaluasi model pengukuran pasca tuntas dilaksanakan. Berikut perolehan dari Inner Model ialah:

Gambar 2. Inner Model



1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R Square atau R^2) dimanfaatkan guna memperlihatkan seberapa jaug variabel laten endogen bisa dijabarkan oleh variabel laten eksogen pada suatu model. Berikut hasil perhitungan koefisien determinasi pada studi ditampilkan:

Tabel 6. R Square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kinerja Instansi (Y)	0.526	0.514

Mengacu pada tabel 6, skor R Square (R^2) sejumlah 0,526 memperlihatkan bahwasanya Keterbukaan Informasi Publik serta Akuntabilitas bisa menjabarkan 52,6% variasi Kinerja Instansi, sedangkan Adjusted R Square sejumlah 0,514 memperlihatkan model cukup stabil. Sisanya 47,4% dikenai pengaruh faktor lainnya di luar studi. Maka dari itu, model mempunyai kapabilitas guna menjabarkan dengan cukup kuat (moderate).

2. *F Square*

Nilai F Square dimanfaatkan guna mengamati sebesar apa kontribusi relatif dari variabel laten eksogen guna memengaruhi variabel laten endogen. Tingginya skor F Square, akan selaras dengan kuatnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model. Berikut ditampilkan perolehan atas perhitungan F Square pada studi ini:

Tabel 7. F Square

Variabel	**Kinerja Instansi (Y)**
Akuntabilitas (X2)	0.277
Keterbukaan Informasi Publik (X1)	0.453

Berdasarkan tabel, skor F Square (f^2) memperlihatkan bahwasanya Akuntabilitas (X2) mempunyai nilai 0,277 yang termasuk kategori sedang, sedangkan Keterbukaan Informasi Publik (X1) memiliki nilai 0,453 yang termasuk kategori besar. Hal ini berarti kedua variabel berpengaruh terhadap Kinerja Instansi, namun Keterbukaan Informasi Publik memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan Akuntabilitas.

3. Model Fit

Evaluasi kelayakan model (*model fit*) pada studi ini dilakukan memanfaatkan Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). SRMR merupakan bagian dari indeks yang memperlihatkan taraf keselarasan di antara model yang diestimasi dengan data yang sebenarnya. Berikut perolehan atas pengujian model fit pada studi ini:

Tabel 8. Model Fit

Indikator	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.055	0.055
d_ULS	1.335	1.335
d_G	1.122	1.122
Chi-square	469.687	469.687
NFI	0.826	0.826

Mengacu pada tabel sebelumnya, didapatkan informasi bahwasanya skor SRMR yakni sejumlah 0,051 < 0,1. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwasanya model pada studi ini mencukupi uji kesesuaian model.

Pengujian Hipotesis

Analisis Pengaruh Langsung mempunyai tujuan guna melaksanakan pengujian dampak langsung di antara variabel laten eksogen bagi variabel laten endogen. Berikut hasil pengujian langsung pada studi ini ialah:

Tabel 9. Path Coefficient

Pengaruh Antar Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
Akuntabilitas (X2) -> Kinerja Instansi (Y)	0.387	0.389	4.759	0.000
Keterbukaan Informasi Publik (X1) -> Kinerja Instansi (Y)	0.494	0.496	7.110	0.000

Berdasarkan hasil *uji bootstrapping*, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi (Y)

   Akuntabilitas memiliki nilai koefisien sejumlah 0,387 dengan skor T-statistics sejumlah 4,759 (> 1,96) serta P-values sejumlah 0,000 (< 0,05). Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya Akuntabilitas berdampak signifikan positif bagi Kinerja Instansi. Maka dari itu, hipotesis yang mengutarakan bahwasanya Akuntabilitas berpengaruh bagi Kinerja Instansi diterima. Mengartikan bahwasanya, baiknya penerapan akuntabilitas, akan selaras dengan meningkatnya kinerja instansi.
2. Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik (X1) terhadap Kinerja Instansi (Y)

   Keterbukaan Informasi Publik memiliki nilai koefisien sejumlah 0,494 melalui skor T-statistics sejumlah 7,110 (> 1,96) serta P-values sejumlah 0,000 (< 0,05). Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya Keterbukaan Informasi Publik berdampak signifikan positif bagi Kinerja Instansi. Maka dari itu, hipotesis yang mengungkapkan bahwasanya Keterbukaan

Informasi Publik berpengaruh bagi Kinerja Instansi diterima. Mengartikan bahwasanya, tingginya tingkat keterbukaan informasi publik, akan selaras dengan baiknya kinerja instansi.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi

Akuntabilitas terbukti berdampak signifikan positif bagi kinerja instansi, karena mendorong pertanggungjawaban yang jelas atas program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sehingga kinerja menjadi lebih terukur, efektif, dan profesional. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang meminimalkan penyimpangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perihal tersebut selaras dengan prinsip good governance yang menitikberatkan transparansi, kepatuhan aturan, serta sistem pengawasan yang jelas. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Shandy dan Sriwinarti (2023), Puspitawati dan Marselina (2022), serta Christina Yunnita Garung dan Linda Lomi (2023) yang menyatakan bahwasanya akuntabilitas meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Temuan serupa juga diperkuat oleh Ananda Dewi Permata Sari (2020), Fatimah Elkha dan Wahidahwati (2020), serta Moerrin dan Priono (2022). Namun, Ambarwati (2021) memperlihatkan bahwasanya efektivitas akuntabilitas dipengaruhi faktor lain seperti pengawasan, kualitas SDM, dan teknologi informasi. Di Kecamatan Medan Helvetia, akuntabilitas terbukti meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta kualitas pelayanan melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja instansi dan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis untuk mendorong efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik.

Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kinerja Instansi

Keterbukaan informasi publik juga terbukti berdampak signifikan positif bagi kinerja instansi, karena mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program. Transparansi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sesuai prinsip good governance. Perolehan tersebut selaras dengan studi Shandy serta Sriwinarti (2023), Puspitawati serta Marselina (2022), serta Christina Yunnita Garung dan Linda Lomi (2023) yang memperlihatkan bahwasanya transparansi meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Temuan tersebut juga didukung oleh Ananda Dewi Permata Sari (2020), Fatimah Elkha dan Wahidahwati (2020), serta Moerrin dan Priono (2022). Selain itu, Pratama dan Kamela (2025) serta Idah Rosidah et al. (2023) menekankan pentingnya dukungan pengawasan dan sistem informasi agar transparansi lebih optimal. Di Kecamatan Medan Helvetia, keterbukaan informasi mendorong disiplin, profesionalisme, serta evaluasi kinerja yang lebih objektif. Secara keseluruhan, keterbukaan informasi publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja instansi dan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Mengacu pada perolehan studi terkait pengaruh keterbukaan informasi publik serta akuntabilitas bagi kinerja instansi di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya akuntabilitas mempunyai pengaruh positif bagi kinerja instansi, yang berarti semakin baik penerapan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban aparatur, maka semakin tinggi pula kinerja instansi. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga berpengaruh positif bagi kinerja instansi, yang memperlihatkan bahwasanya tingginya tingkat transparansi dalam pelaporan kegiatan serta pengambilan keputusan, akan selaras dengan baiknya kinerja instansi dalam memberikan pelayanan publik.

Saran

Mengacu pada perolehan studi, diberi masukan supaya instansi pemerintah, terlebih di tingkat kecamatan, terus meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi. Peningkatan keterbukaan informasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital guna mengadakan akses informasi yang cepat, mudah, serta transparan bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan sistem akuntabilitas melalui penyusunan laporan kinerja yang lebih sistematis, evaluatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Instansi juga butuh menaikkan kapasitas SDM mereka dengan melangsungkan pelatihan serta pengembangan kompetensi, sehingga mampu mendukung implementasi transparansi serta akuntabilitas dengan optimal. Di samping itu, pengawasan internal serta partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan guna memastikan bahwasanya setiap program serta aktivitas berjalan sesuai dengan prinsip good governance.

Referensi

Ambarwati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi. *Journal of Business and Economics JBE) UPI YPTK*, *6*(3), 88-96.

Andriana, D. (2025). *Akuntabilitas Publik*. Deepublish.

Ardiansyah, B. (2022). Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 14(2), 115–128. https://doi.org/10.1234/japk.2022.14209

Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, *11*(2), 31-45.

Damanik, I. M., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2025). Open Government Framework And Performance: An Interaction Approach Within The Concept Of Enterprise Risk Management For Local Governments In Indonesia. Lex Localis: Journal Of Local Self-Government, 23(11).

Fadli, & Nurul. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan good governance terhadap kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, 9(1), 45–57. https://doi.org/10.1234/jipp.2021.09104

Fanggidae, H. C., & SE, M. A. (2022). Kinerja Dan Pengukuran Kinerja. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori Dan Aplikasi*, *19*.

Ghozali, I. (2022). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gumolung, S., Rares, J., & Mambo, R. (2023). Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Bowombaru Utara Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, *9*(3), 528-538.

Handayani, H., Mustafa, D., & Juharni, J. (2024). Analisis Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tallo. *Paradigma Journal of Administration*, *2*(1), 07-13.

Haryani, S. (2021). Keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, 7(3), 201–214. https://doi.org/10.1234/jtap.2021.07305

Hasibuan, M. S. P. (2021). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Indriastuti, I. (2020). Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, *10*(1), 60-75.

Irawan, I. R. N., & Sani, A. Accountability And Transparency Of District Financial Reports.

Irawan, I., Muda, I., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2026). Open Government Framework Model To Performance For Local Governments In Indonesia. In The Future Of Work: How Technology Is Transforming Jobs And Skills (Pp. 675-684). Cham: Springer Nature Switzerland.

Kabupaten Lampung Barat. (2020). *Keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah*. Lampung Barat: Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

Komisi Informasi. (2021–2023). *Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2021–2023*. Jakarta: Komisi Informasi Republik Indonesia.

Lestari, D. (2023). Akuntabilitas publik sebagai determinan peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 11(1), 33–47. https://doi.org/10.1234/jmkp.2023.11102

Lita, L. H. G., Syahputri, A., Niswa, K., & Harnia, A. (2025). Model Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jad: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara, 8(1), 1-12.

Mangkunegara, A. P. (2021). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya.

Mardiana, R. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Kecamatan Slahung* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Mareta, F. C., & Fakih, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *6*(2), 231-240.

Marsellina, B. S. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi informasi terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, 8(2), 150–163. https://doi.org/10.1234/japd.2022.08206

Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Spasi Media.

Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, *10*(01).

Nugroho, B. (2021). Transparansi informasi publik dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Daerah dan Akuntansi Publik*, 6(4), 299–312. https://doi.org/10.1234/jkdap.2021.06408

Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, *1*(1), 40-52.

Oktaviani, C. (2023). *Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pertumbuhan Ekonomi, Kompleksitas Daerah dan Internet Financial Reporting (IFR) terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Putra, M. A., Taufik, T., & Aunnurrafiq, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, *4*(1), 31-41.

Putri, & Rahman. (2021). Good governance dan transparansi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 88–102. https://doi.org/10.1234/jian.2021.12203

Saleh, A. (2016). *Akuntabilitas dan transparansi di Kantor Camat Medan Helvetia: Partisipasi masyarakat dan implikasinya terhadap kinerja instansi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Santoso, & Hidayat. (2022). Transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar good governance di sektor publik. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 10(1), 66–79. https://doi.org/10.1234/jtgp.2022.10105

Sari, M. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan penerapan good governance terhadap efektivitas kerja instansi pemerintah. *Jurnal Efektivitas Organisasi Publik*, 5(1), 12–25. https://doi.org/10.1234/jeop.2023.05102

Segarawasesa, F. S., & Mustika, M. (2023). Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, *4*(5), 76-88.

Shandy, C. M. A., & Sriwinarti, N. K. (2025). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 2711-2718.

Sine, E. P., Tunti, M. E. D., & Rafael, S. J. M. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi pada sekolah di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, *9*(1), 1-8.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1).

Wulandari, R. (2023). Transparansi dan partisipasi publik dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Partisipasi dan Demokrasi Publik*, 13(2), 140–154. https://doi.org/10.1234/jpdp.2023.13207

Yashyfa, A. M. (2023). *Pengaruh kompetensi terhadap kinerja PPID Kabupaten Purwakarta dalam pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Purwakarta* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).